

**DAMPAK DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP KETIMPANGAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN PERIODE 2005 – 2014**

Muhammad Azizi

*Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: Muhazizii@gmail.com*

ABSTRACT

The aims of this research are: (1) to find out the effect of special allocation fund component on the decrease in gross regional domestic product (GRDP) disparity between districts of South Celebes province period 2005-2014, (2) to know the effect of general allocation fund component on the decrease of gross regional domestic product inequality (GRDP) between districts in south Celebes province period 2005-2014, (3) to know the effect of profit sharing component on the decreasing inequality of gross regional domestic product inequality (GRDP) between districts in South Celebes province period 2005-2014. Data collection method using documentation method. The data collected were obtained from the central statistical agency of South Celebes province. To analyze the data used multiple linear regression analysis method which is a quantitative method to analyze the data. more than one research variable.

The result showed that: (1) the effect of general allocation funds on gross regional domestic product inequality in south celebes show the positive and significant results when the general allocation fund increased, the level of inequality of gross regional domestic product in celebes province will also increase, (2) the effect of special allocation funds on gross regional domestic product inequality in south celebes province show negative and significant result, where when the value of special allocation fund increases, the level of inequality of gross regional domestic product in South celebes province will decrease or vice versa if the value of special allocation fund decreased then the level of inequality of gross regional domestic product in South celebes province will increase,(3) the effect of profit sharing on the gross regional domestic product inequality shows negative and significant result where when the value of profit sharing proceeds the level of inequality of gross regional domestic product will decrease on the contrary if the value of profit-sharing fund decreased then the level of inequality of gross regional domestic product in will increase.

Keywords: general allocation funds, special allocation funds, revenue-sharing funds, inequality, gross regional domestic product.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah.

Oxfam Indonesia dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) dalam laporannya yang berjudul "Menuju Indonesia yang Lebih Setara" mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen. Namun, *Oxfam* dan *INFID* menilai, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Selama dua

dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin, (*Kompas*, Kamis, 23 Februari 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya berimbas pada tingkat nasional tidak serta pada tingkatan daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kawasan di Indonesia. Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan alasan, bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak semuanya bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki daya dukung dan sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah menyerap peluang pembangunan, sedangkan daerah yang tidak sesuai kriteria kebijakan nasional akan mengalami perlambatan dalam pembangunan.

Sehingga dengan adanya otonomi daerah dan

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi. Di mana kebijakan pembangunan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif

antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto (*gross domestic regional product*) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat. Hal ini menimbulkan keterlambatan pembangunan di daerah-daerah terutama bagi daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat, Jakarta.

Segala kebijakan yang diatur dan diputuskan oleh pemerintah pusat, termasuk keuangan daerah menyebabkan banyak kepentingan dan kebutuhan daerah yang tidak terakomodir. Pemerintah pusat mengambil kebijakan dari sudut pandang mereka bukan dari sudut pandang daerah. Sementara yang mengetahui kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri bukan pemerintah pusat.

Beranjak dari permasalahan yang timbul di masa pemerintahan sentralistik maka pemerintah merumuskan Undang-Undang mengenai otonomi daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2000. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai

dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83). Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Ibid : 83).

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga mendapatkan dana perimbangan setiap tahunnya. Dana perimbangan ini kemudian dialokasikan ke Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang jumlahnya berbeda satu sama lain. Perbedaan alokasi dana perimbangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara masing-masing Kabupaten/Kota.

Dampak positif diberlakukannya desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari perkembangan ekonomi di Sulawesi selatan.

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2014

No	Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)
1	2005	36.421,79
2	2006	38.867,68
3	2007	41.332,43
4	2008	44.549,82
5	2009	47.314,20
6	2010	51.199,90
7	2011	55.116,92
8	2012	56.466,90
9	2013	58.123,02
10	2014	59.106,82
Total		488.499,48

Sumber: BPS Sulawesi selatan (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kenaikan PDRB terbesar terjadi pada tahun 2011, dimana pada tahun 2010 jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 51.199,90 Milyar dan 2011 mencapai Rp.

55.116,92 Milyar. Adapun total PDRB dari tahun 2005-2014 Rp.488.499,48 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkonomian Sulawesi selatan secara keseluruhan mengalami kenaikan.

Adapun data pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2010	8,19
2	2011	8,13
3	2012	8,17
4	2013	7,63
5	2014	7,57
Rata-rata		7,93

Sumber: BPS Sulawesi selatan (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2014 mengalami fluktuasi. dari tahun 2010-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 7,93. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan cenderung positif.

Selanjutnya menurut Todaro (2000) bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.

Berdasarkan uraian latar belakang, Sulawesi selatan memiliki kondisii perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul "Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik

Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 - 2014".

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Sejak tahun 2001, dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sekarang kedua UU di atas sudah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), maka pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengaturan keuangan daerahnya masing-masing.

Dalam UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke desa.

Dalam UU No.33 tahun 2004 dijelaskan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

Keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas bantukan kepada Daerah.

Selain UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, konsep desentralisasi juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Dalam mendefinisikan desentralisasi, beberapa ahli menggunakan pandangan dan perspektifnya masing-masing. Parson (1961) dalam Hidayat (2004) mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut:

“Sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state”. Pada bagian lain, Smith (dalam Hidayat, 2004) merumuskan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politik, yakni: *“the transfer of power from top level to lower level, in a territorial hierarchy, witch could be one of government within a state, or offices within a large organisation”*.

Dua belas kaidah yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal khususnya di negara berkembang. *Pertama*, sistem desentralisasi fiskal mesti dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif mulai dari

otonomi politik sampai dengan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran dan transparansi. *Kedua*, desentralisasi fiskal harus dimulai dari penentuan tanggung jawab pengeluaran baru kemudian ditentukan penerimaannya.

Ketiga, desentralisasi fiskal harus didukung kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan. *Keempat*, suatu sistem hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada daerah tertentu tidak akan cocok untuk semua Kota/Kabupaten.

Kelima, desentralisasi fiskal membutuhkan kemampuan pajak daerah yang memadai. *Keenam*, pemerintah pusat harus konsisten dengan aturandesentralisasi fiskal yang ditetapkannya. *Ketujuh*, administrasi hubungan fiskal antar pemerintahan harus sederhana.

Kedelapan, perencanaan sistem transfer keuangan antar pemerintahan harus sesuai tujuan dari reformasi desentralisasi.

Kesembilan, desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kepentingan ketiga tingkat pemerintahan yaitu pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Kesepuluh, penegakan pembatasan anggaran yang ketat. *Kesebelas*, harus disadari bahwa sistem perimbangan pemerintahan selalu dalam transisi dan perencanaan. *Keduabelas*, kebijakan desentralisasi fiskal harus

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

melahirkan jawahara yang mengerti manfaat dan biaya yang menyertainya.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Adapun tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, yaitu untuk kesinambungan kebijaksanaan fiskal (*Fiskal Sustainability*) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan Daerah yang dilakukan dengan memperbesar *taxing power* Daerah; mengoreksi *horizontal imbalance* yaitu ketimpangan antar Daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi kemampuan keuangan antar Daerah; berkurangnya tingkat ketergantungan fiskal

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat; akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah; peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

daerah ditentukan atas besar kecilnya celah Fiskal (*Fiskal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*Fiskal need*) dan potensi daerah (*Fiskal capacity*). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah Fiskal dan penambahan variable DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan Fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan Fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relative besar. Secara implicit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai factor pemerataan kapasitas Fiskal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan pra sarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja Negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sementara Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi

Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7%.

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah.

Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakan faktor pengurang. Namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dengan UU Nomor 18 Tahun 2001, dan bagi propinsi Papua yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001, bagian kedua daerah tersebut dari penerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi 70%. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80%.

Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto

Berhasilnya suatu pembangunan oleh suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian yang ada, apakah mengalami

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

peningkatan atau penurunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk dalam salah satu indikator pembangunan suatu daerah. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan PDRB secara terus menerus. Pembangunan suatu daerah yang baik juga harus diikuti pembangunan ekonomi yang baik juga di setiap daerah. Hal ini bisa dilihat dari periode ke periode lainnya bahwa kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Salah satu faktor peningkatan atau penurunan pembangunan ekonomi daerah ialah ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto yang tidak merata.

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Myrdal (1957) dalam Jhingan (2004) menerangkan ketimpangan antar daerah

dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjarangan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar.

Backwash effect didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perbedaan kemajuan wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh sehingga yang timbul adalah terjadinya ketidakmerataan antar daerah.

Ketimpangan adalah kesenjangan pembangunan

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

antar wilayah dalam suatu perekonomian dan merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia.

Faktor – faktor penyebab ketimpangan daerah yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas factor produksi yang rendah antar wilayah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah, dan lancarnya pendapatan antar wilayah.

Indeks Wiliamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini

didasarkan pada *coeffisient of variation* (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangnnya dengan proporsi penduduk wilayah.

Berbeda halnya dengan *gini coeffisient* yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeksWilliamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{F_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CVw =Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

F_i =Jumlah penduduk di kab/kota i

n =Jumlah penduduk provinsi

Y_i = Pendapatan perkapita di kab/kota i

Y =Rata-rata pendapatan perkapita untuk seluruh propinsi

Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan

menggunakan ukuran ini, yaitu:
 Nilai indeks > 1, terjadi ketimpangan yang maksimum
 Nilai indeks 0,7 – 1 , terjadi ketimpangan yang tinggi
 Nilai indeks 0,4 – 0,6 , terjadi ketimpangan yang sedang
 Nilai indeks < 0,3 , terjadi ketimpangan yang rendah

Hubungan Ketimpangan Daerah terhadap Dana Perimbangan

Kusnetz (1957) dalam Tambunan (2015) mengemukakan suatu pola hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini dikenal dengan “Hipotesis U

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

Terbalik". Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebasserta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-ratanya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

Pengalokasian dana perimbangan kepada daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah.

Pengalokasian dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Laju pertumbuhan yang beragam di setiap daerah akan berdampak kepada ketimpangan.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah.

Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah

Kegiatan Ekonomi suatu daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang biasa terjadi. Ketimpangan ini biasanya disebabkan adanya perbedaan tingkat sumber daya alam dan faktor lain yang terdapat pada daerah masing-masing, Dengan adanya perbedaan tersebut membuat kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda.

Menurut Sjafrizal,

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

(2008:104) maka tidaklah mengherankan bila setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah akan membawa pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah tidaklah mudah. Banyak argument yang menjelaskan bahwa ketimpangan ada karena banyaknya kemiskinan pada suatu wilayah dan juga banyak yang berpendapat bahwa ketimpangan terjadi karena adanya kemiskinan ditengah kemapanan masyarakat. Namun dalam ketimpangan pembangunan antar wilayah ini yang menjadi fofus bukan antar kelompok kaya dan miskin melainkan adanya daerah yang tertinggal dan daerah yang maju.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012:117) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan.
2. Perbedaan kondisi demografis
Perbedaan kondisi demografis meliputi

perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan.
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad, (1999) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan

- menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
 5. Rendahnya mobilitas sosial.
 6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
 7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Hubungan Pola Perekonomian Daerah dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak serta merta dipandang sebagai kenaikan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan adanya pertumbuhan penduduk serta perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural) (Arsyad, 1999).

Setelah adanya otonomi, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat ditentukan oleh adanya keuntungan lokasi pada daerah tersebut. Seperti yang dapat dijelaskan dalam teori basis ekspor, bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan adalah keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Apabila pemanfaatan keuntungan komparatif yang dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor maka pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan.

Sedangkan berdasarkan teori Neo Klasik, pertumbuhan ekonomi suatu daerah

ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Pertumbuhan ekonomi wilayah selain ditentukan oleh potensi daerah, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Namun modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan maupun kemakmuran) masyarakat. Untuk dapat mengkategorikan kesejahteraan masyarakat, setiap individu memiliki kategori tersendiri untuk bisa dikatakan sejahtera. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengelompokkan tingkatan kesejahteraan keluarga menjadi 5 kategori yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Keluarga Sangat Miskin).

Dikatakan keluarga Pra Sejahtera apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Indikator Ekonomi.
 - a) makan dua kali atau lebih dalam satu hari.
 - b) memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas di rumah, bekerja,

sekolah dan berpergian.

- b. Indikator Non Ekonomi.
 - a) melaksanakan ibadah.
 - b) apabila anak sakit dibawa kerumah sakit.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I (Keluarga Miskin).

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap I apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Indikator Ekonomi.
 - a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
 - b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakainya baru.
 - c) Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni.

3. Indikator non Ekonomi.

- a. Ibadah teratur.
- b. Sehat tiga bulan terakhir.
- c. Punya penghasilan tetap.
- d. Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf.
- e. Usia 6-15 tahun bersekolah.
- f. Anak lebih dari 2 atau ber KB.

5. Keluarga Sejahtera Tahap II.

Dikatakan keluarga Sejahtera tahap II apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Memiliki tabungan keluarga, makanan

- bersama sambil berkomunikasi.
- b. Mengikuti kegiatan masyarakat.
 - c. Rekreasi bersama 6 bulan sekali.
 - d. Meningkatkan pengetahuan agama.
 - e. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.
 - f. Menggunakan sarana transportasi.
6. Keluarga Sejahtera Tahap III. Dikatakan keluarga Sejahtera tahap III apabila dapat memenuhi indikator yang meliputi:
- a. Memiliki tabungan keluarga.
 - b. Makanan bersama sambil berkomunikasi.
 - c. Mengikuti kegiatan masyarakat.
 - d. Rekreasi bersama 6 bulan sekali.
 - e. Meningkatkan pengetahuan agama.
 - f. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, maupun majalah.
 - g. Menggunakan sarana transportasi.
7. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Dikatakan keluarga Sejahtera tahap III plus apabila dapat memenuhi indikator yang meliputi:
- a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
 - b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Kesejahteraan
merupakan kondisi tidak miskin yang menjadi keinginan setiap orang. Dan permasalahan utama dalam negara berkembang selain masalah pengangguran tetapi juga masalah kemiskinan. Seperti konsep lingkaran setan kemiskinan, dimana setiap aspek mampu saling mempengaruhi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga kondisi kemiskinan yang semakin meningkat dalam suatu daerah, dapat berpengaruh pula terhadap tingkat pembangunan daerah tersebut.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa regresi liner berganda yang merupakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisa data lebih dari satu variabel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan Dana Perimbangan dan Indeks Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2005-2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non perilaku. Observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat hanya sebagai pengamat independen. Dengan metode ini semua data diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, tesis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendasar dan benar. Metode tesis yang digunakan penulis adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis

maupun elektronik dari lembaga/institusi dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain, Data yang penulis maksud dapat diperoleh dari badan pusat statistik Provinsi Sulawesi selatan. Data yang diperoleh adalah hasil akhir laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan berupa data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005-2014.

Instrumen Analisis Data

Dalam analisis data, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks Williamson, Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{F_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CVw = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

Fi = Jumlah penduduk di kab/kota i

N = Jumlah penduduk provinsi

Yi = Pendapatan perkapita di kab/kota i

Y = Rata-rata pendapatan perkapita untuk seluruh propinsi

2. Uji Asumsi Klasik

3. Model Pengujian Hipotesis

Model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3+e$$

Dimana:

Y_1 = Ketimpangan PDRB

a = Konstanta

X_1 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Bagi Hasil (DBH)

e = Error term

b_1 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X_1

b_2 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X_2

b_3 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X_3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar

sampai tidak terhingga. Distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstem dalam data yang diambil. (Suliyanto, 2005: 78). Untuk mendeteksi normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan nilai normalitas yakni signifikansi mesti lebih besar dari 0,05 sehingga bisa dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 3
Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1230000
	Std. Deviation	,06103036
	Absolute	,189
Most Extreme Differences	Positive	,189
	Negative	-,161
Kolmogorov-Smirnov Z		,597
Asymp. Sig. (2-tailed)		,869

Sumber: Data Primer

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai KZS sebesar 0,597 serta signifikansi sebesar 0,869. Sesuai dengan standar normalitas yang menyatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan data diatas berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya problem multikolonieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji multikolonieritas.

Tabel 4
Coefficients(a)

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 DAU	,106	9,474
DAK	,181	5,540
DBH	,276	3,626

Sumber: Data Primer

Dari data statistic kolineritas, diperoleh *Variance Inflation Factor* (VIF) dari variabel bebas DAU (X1), DAK (X2) dan DBH (X3) (yaitu $VIF < 10$, artinya tidak terjadi multikolinieritas. Sebagaimana ditunjukkan pada table yaitu bahwa VIF untuk DAU (X1) adalah 9,474, VIF untuk DAK (X2) adalah 5,687 dan nilai VIF untuk DBH

(X3) adalah 4,223. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini tidak mengalami multikolinieritas karena VIF seluruh variabel berada pada nilai lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

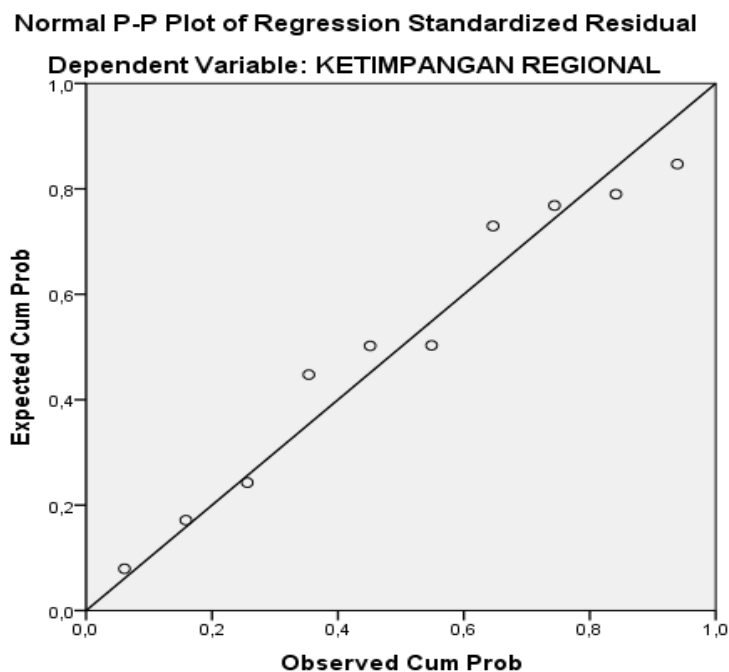
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, Jika terdapat polatertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastis.

Sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada gambar di atas maka dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*). Berdasarkan hasil pengolahan data.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	6 ^a	,059	1,803

Sumber: Data Primer

Pada table model *summary* yang menunjukkan bahwa hasil dari *Durbin-Watson* didapatkan nilai 1,805. Sesuai dengan kaidah yang ada di mana nilai Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005:68).

1. Model Pengujian Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					F Change	Sig. F Change
1	,829 ^a	,687	,530	,05048	4,1386	,059

Sumber: Data Primer

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R2*) sebesar 0,687 atau 68,7%, nilai ini menunjukkan bahwa variabel *Ketimpangan PDRB* dapat dijelaskan sebesar 68,7% oleh

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan *Dana Bagi Hasil (DBH)* sedangkan sisanya 31,3% (100% - 68,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

tercakup dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji statistik F.

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,034	3	,011	4,386	,059 ^b
1 Residual	,015	6	,003		
Total	,049	9			

a. Dependent Variable: KETIMPANGAN REGIONAL

b. Predictors: (Constant), DAK, DAK, DAU

Sumber: Data Primer

Tabel di atas menunjukkan hasil uji statistik F dengan nilai F_{hitung} sebesar 4,386 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,059. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel *Ketimpangan PDRB*.

atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

c. Uji t (Individu)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada

Tabel 8
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,104	,095		1,105	,312
1 DAU	8,280E-013	,000	2,527	3,593	,011
DAK	-4,172E-012	,000	-1,448	-2,693	,036
DBH	-1,920E-012	,000	-1,195	-2,746	,033

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien model regresi memiliki nilai *constant* sebesar 0,104 dengan nilai t hitung 1,105 dan nilai sig. sebesar 0,312.

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai t hitung sebesar 2,527 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,011 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif sebesar 8,280E-013. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAK) mempengaruhi

Ketimpangan PDRB secara positif dan signifikan. Hal ini berarti H1 secara parsial ditolak.

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai t hitung sebesar -1,448 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,036 dan nilai beta yang dihasilkan adalah Negatif sebesar -4,172E-012. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi *Ketimpangan PDRB* secara Negatif dan

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

signifikan. Hal ini berarti H2 secara parsial diterima.

Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai t hitung sebesar -2,746 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,033 dan nilai beta yang dihasilkan adalah Negatif sebesar -1,920E-012. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas

signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil mempengaruhi *Ketimpangan PDRB* secara Negatif dan signifikan. Hal ini berarti H3 secara parsial diterima.

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,104 + 8,280E-013 X1 - 4,172E-012 X2 - 1,920E-012 X3$$

Dimana:

- Y = Ketimpangan Regional
- X1 = Dana Alokasi Umum
- X2 = Dana Alokasi Khusus
- X3 = Dana Bagi Hasil

1. Constanta = 0,104, artinya jika tidak ada DAU, DAK, dan DBH maka ketimpangan regional akan naik sebesar 0,104%
2. Dana Alokasi Umum (X1) = 8,280E-013, artinya jika ada penambahan dana alokasi umum sebesar Rp.1 maka akan menyebabkan ketimpangan regional Sulawesi Selatan akan meningkat sebesar 8,280E-013 %.
3. Dana alokasi khusus (X2) = -4,172E-012, artinya jika ada penambahan dana alokasi khusus sebesar Rp.1 maka

- akan menyebabkan ketimpangan regional Sulawesi Selatan akan menurun sebesar 4,172E-012 %.
- 4. Dana bagi hasil (X3) = -1,920E-012 artinya jika ada penambahan dana bagi hasil sebesar Rp.1 maka akan menyebabkan ketimpangan regional Sulawesi Selatan akan menurun sebesar 1,920E-012 %.

Hasil regresi linier berganda di atas menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada

tahun 2005 s/d 2014, variabel dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014 dan variabel dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014. Ada beberapa alat Analisis data yang menggunakan regresi linier berganda uji hipotesis yang mencakup uji Adj R², uji F dan uji t. dan uji asumsi klasik yang meliputi uji Multikoloniaritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastiritas, uji normalitas serta uji hipotesis yang mencakup uji Adj R², uji F dan uji t.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil dari berbagai macam model pengujian maka diperoleh menunjukkan bahwa Dana

Alokasi Umum (X1) bahwa Dana Alokasi Umum (X1) pengaruh positif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Alokasi Umum naik sebesar Rp1 maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan juga akan meningkat sebesar atau sebaliknya di mana ketika nilai Dana Alokasi Umum ini mengalami penurunan maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan juga akan mengalami penurunan. Hal ini juga di sebabkan oleh pengalokasian Dana Alokasi Umum dan perubahan laju pertumbuhan ekonomi tidak merata di setiap daerahnya yang menyebabkan ketimpangan regional juga akan meningkat.

Menurut Menurut Yani (2009:142), Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU di suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh *Sirumapea (2007)* dalam penelitiannya tentang *Dampak Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota se-Sumatera Utara periode waktu 2001-2004*. Menunjukkan hasil yang sama dengan hasil bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta faktor populasi penduduk juga mempunyai mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari produksi dan konsumsi berdasarkan alat analisis *Generalized Least Square (GLS)*

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil dari berbagai macam model pengujian maka diperoleh menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh Negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Alokasi Khusus naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan atau sebaliknya ketika Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka tingkat ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (Dana Alokasi Khusus) untuk

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Berdasarkan hasil dari berbagai macam model pengujian maka diperoleh menunjukkan bahwa Dana Alokasi khusus mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh *Fatimah (2007)* dalam penelitiannya tentang *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 1993-2004*. Dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson menyimpulkan bahwa ketimpangan transfer Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatnya ketimpangan transfer fiskal ini maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Lebih jauh, karena peningkatan ketimpangan transfer fiskal ini disebabkan oleh meningkatnya dana transfer yang diperoleh pemerintah daerah. Maka hal ini pun akan berarti bahwa peningkatan dana transfer akan berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dana transfer untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia membawa dampak yang positif terhadap

tingkat pemerataan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (X3) Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil dari berbagai macam model pengujian maka diperoleh menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh Negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Bagi Hasil naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan atau sebaliknya ketika Dana Bagi Hasil mengalami penurunan maka tingkat ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan oleh Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya di dasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Namun dana yang berasal dari pemungutan pajak dan bukan pajak yang di serahkan oleh pusat kepada setiap daerah Sulawesi Selatan mengalami Fluktuasi setiap tahunnya, selain itu penerimaan dari sumber daya alam setiap daerah tidak sama, ada daerah dengan sumber daya alam tidak besar dan ada daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar, sehingga masih belum memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Demikian halnya dalam sistem dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, peranan pajak dalam penerimaan pendapatan daerah masih sangat rendah karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil positif dan signifikan dimana ketika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan juga akan mengalami peningkatan.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Alokasi Khusus naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan atau sebaliknya jika nilai Dana Alokasi khusus menurun maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkat.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan di mana ketika nilai Dana Bagi Hasil naik maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan atau sebaliknya jika nilai

Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.....Muhammad Azizi

Dana Bagi Hasil menurun maka tingkat Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkat.

SARAN

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pembagian Dana Alokasi Umum pada setiap daerah mempengaruhi tingkat ketimpangan regional serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan maka dari itu penyaluran Dana Alokasi Umum yang merata setiap daerah juga sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka yang di harapkan tingkat kemandirian ekonomi di setiap daerah akan berjalan dengan baik.
2. Penyaluran Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik sesuai pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang untuk itu dapat dipertahankan dan peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gerbang Indonesia Timur.

3. Penyaluran Dana Bagi Hasil di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mempengaruhi penurunan ketimpangan regional maka dari itu agar pelaksanaan setiap tahunnya dapat dipertahankan agar ketimpangan disetiap tahunnya mengalami penurunan berguna bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan untuk mewujudkan distribusi perekonomian yang lebih merata khususnya pada transfer pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bahl, Roy W. and Johannes F. Linn. 1992. Perkotaan keuangan publik dan Negara Berkembang Oxford: Oxford Universtty Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2010. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2010. Makassar: Sulawesi Selatan.
2007. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.

2008. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
2009. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
2010. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
2011. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
2012. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
2013. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2012. Makassar: Sulawesi Selatan.
2014. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2013. Makassar: Sulawesi Selatan.
2015. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2014. Makassar: Sulawesi Selatan.
- Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- Davoodi, D. and Zou, H. 1998. desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: lintas studi negara Jurnal Ekonomi Perkotaan,43(2)
- Hidayat, S. 2004. Desentralisasi: Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar, Pengalaman Negara Lain, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia, dalam Susanto (penyunting), Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris .PPE-LIPI, Jakarta
- Jhingan M.L. 2012.Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
2010. Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nugroho, 2005. Strategi Jitu memilih Metode statistic Penelitian dengan SPSS, Andi Jogjakarta
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama. Baduose Media,. Padang.
- , 2012. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.

- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus. 2015. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga*
- Jokowi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zakaria, Junaidin. 2015. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.